

CITRA DALAM POLITIK KOTA: KAJIAN KOTA SURAKARTA 2005-2013**Priyatno Harsasto****Abstract**

Local government leaders with good vision would have strong powers and new incentives for policy innovation. In Surakarta local leaders have been playing crucial role in shaping new direction for urban development. In the name of political inclusion, they ask community groups as well business groups to involve in the policy process. Based on a case study in Surakarta city, this report argues that the active role of local government can be attributed as the broad explanation for the Surakarta city's performance in urban development. This study's findings suggest that government leadership is an important policy determinant that can shape the interests of the community and business. Vision "Solo Past is Solo Future" has been the rallying point of the local economic development. This vision has been able to be used to create cultural activities that has been determinant in bridging the interests of the society as a whole.

Key words: Vision, Community, networking

1. Pendahuluan

Surakarta telah dikenal sebagai kota budaya. Ini yang kemudian dikembangkan sebagai salah satu visi Kota Surakarta. Perumusan kalimat ikonik "Solo masa depan adalah Solo masa lampau" menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengaktualisasikan kejayaan masa lalu untuk menjadi panduan pembangunan saat ini. Pembangunan kota yang merujuk kepada *local wisdom* dilaksanakan berdasar pada inisiatif lokal yang membuat pemerintah kota memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunannya. Secara empirik praktek inklusi menjadi lebih mudah karena komponen utama dalam proses kemufakatan telah tersedia; dan ini memiliki kekuatan yang signifikan karena aktor yang terlibat tidak perlu lagi membuat semua kegiatan dari tahap awal.

Melalui hubungan yang terjalin, variasi sumber daya aktor yang terlibat dapat dikombinasikan untuk menciptakan solusi atas isu atau masalah yang dihadapi bersama mulai di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan program. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berdasar otoritas akan sangat kurang bermakna dari sisi akuntabilitas dan realibilitasnya. Proses inklusi dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali kebersamaan yang menjadi tulang punggung dinamika pembangunan kota. Proses ini menjadi lebih mudah ketika pemerintah kota mampu mengembangkan citra kota yang memiliki makna merangkum kekuatan sinergitas kelompok-kelompok masyarakat.

Untuk menunjang visi kota Solo sebagai kota wisata, dilakukan penertiban kaki lima melalui relokasi ribuan pedagang kaki lima (PKL). Para PKL yang direlokasi mendapatkan tempat gratis, ijin usaha, bantuan permodalan, serta promosi dan kemudahan transportasi ke lokasi. Revitalisasi pasar tradisional dilakukan terhadap 35 pasar tradisional tanpa memungut biaya dari para pedagang. Disamping itu para pedagang mendapat fasilitas berdagang gratis dan modal usaha. Jadi disamping mendekatkan pengusaha kecil kepada konsumen, bantuan untuk mengembangkan usaha juga dilakukan.

Program-program tersebut dibiayai APBD yang berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi yang baik selama ini. APBD kota Surakarta mencapai Rp.1,03 triliun, dengan pendapatan perkapita Rp.14,6 juta, dan upah minimum regional Rp.835 ribu. Kinerja ekonomi yang menonjol dapat disimak dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.35 Miliar di tahun 2005 menjadi Rp.246 miliar tahun 2013. Disamping itu Surakarta juga merupakan salah satu dari 3 kota terbersih dari korupsi di Indonesia.

Fokus penelitian ini pada bagaimana strategi pemerintah dalam menghasilkan lingkungan dinamik dalam melakukan pembangunan. Pemahaman tentang hal ini penting untuk memberikan kontribusi pada tingkat praksis (mengkonversi dari *bad* menjadi *good practices*), dan kontribusi tingkat teoritik (pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan *structure-agency*). Pertanyaan utama dalam studi ini adalah: Bagaimana citra memainkan peranan dalam politik pembangunan kota? Pertanyaan tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut berikut:

1.1. Bagaimana citra mempengaruhi prioritas pembangunan kota?

1.2. Bagaimana citra mempengaruhi keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses inklusi?

Meskipun penelitian ini merupakan kajian akademik yang terlihat dalam perdebatan-perdebatan ekonomi politik, penelitian ini juga merupakan *evaluation research*, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menelaah kegagalan maupun kesuksesan sebuah kebijakan, kemudian memetakan sebab-sebab penjelasa kesuksesan dan kegagalan tersebut. Oleh karena itu, secara praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai *policy learning* tidak saja bagi daerah obyek penelitian, tetapi juga daerah lain dalam hal upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kota.

2. Kerangka Teori

Ciri-ciri struktural cara pandang tradisional pemerintahan kota menempatkan dominasi bisnis dalam proses kebijakan. Dapat dikatakan, dengan demikian, bahwa masyarakat pada umumnya tergantung kepada investasi dan keuntungan swasta untuk bisa bekerja. Pada gilirannya hal ini menerangkan mengapa negara dan pemerintah lokal harus memfasilitasi akumulasi modal untuk memajukan kepentingan material warga. Posisi bisnis dalam suatu politik perkotaan tidak dapat ditinggalkan, seperti dikatakan Stone: "*Although the nature of business involvement extends from the direct and extensive to the indirect and limited, the economic role of businesses and the resources they control are too important for these enterprises to be left out completely*" (Stone, 1989:7).

Pada saat yang sama struktur kelembagaan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan arena pertumbuhan bersama. Sejumlah studi di Asia (Mahbubani, 2007; Rodrik, 1996), Latin Amerika (Grindle, 2004; 2007) dan Afrika (Gray dan McPherson, 2001) memperlihatkan peran pemerintah dalam menjalankan strategi supervisi birokrasi dalam menciptakan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Inti dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa masalah tidak mungkin diselesaikan semata-mata oleh pemerintah atau mekanisme pasar, tetapi harus melibatkan organisasi-organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya yang diperlukan (Stoker, 2000:98). Sumberdaya tersebut bisa berasal dari organisasi pemerintah atasan maupun organisasi privat. Studi tentang pemerintahan lokal di Amerika menunjukkan pemerintah kota berupaya untuk mengembangkan koalisi diantara aktor-aktor public, privat dan masyarakat (Stoker, 1995; 2000; Stone, 1995). Manfaat didefinisikan oleh partisipasi dari organisasi yang terlibat dalam network. Pemerintah kota

menjadi hub yang menghubungkan kepentingan-kepentingan yang ada. Pemerintah kota sebagai *network's leader* harus dapat menjamin bahwa tiap-tiap sektor dapat memenuhi fungsi sosial mereka dan pada saat yang sama harus bertanggungjawab akan adanya eksternalitas negative, seperti misalnya masalah lingkungan.

Dalam pandangan Judd (2000) politik perkotaan lebih mencerminkan politik internal daripada tekanan eksternal. Pandangan ini mengaitkan hubungan-hubungan dalam tata pemerintahan dalam politik perkotaan. Dalam sistem politik transisional kota Surakarta, tentu saja kajian tentang bagaimana dinamika pertumbuhan itu dibentuk menjadi lebih penting dipahami. Ada beberapa alasan mengapa kajian ini penting. Pertama, peran pemerintah ditentukan oleh hubungan produksi yang dimilikinya. Hubungan ini menentukan kebutuhan pemerintah akan sektor swasta sebagai mitra untuk membangun kota, karena mereka menguasai sektor produksi dalam ekonomi. Kedua, perilaku pemerintah bisa dipengaruhi oleh tiga kekuatan: bisnis, organisasi politik, dan gerakan sosial (Fainstein and Fainstein 1983). Meskipun kepentingan bisnis merupakan pusat dari motivasi gerakan pertumbuhan ekonomi kota, ada hambatan dari kekuatan voting masyarakat yang dipengaruhi organisasi politik dan gerakan sosial. Hambatan ini menggerakkan pemerintah untuk bertindak dalam posisi yang lebih dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan dari tiga kekuatan tersebut secara lebih seimbang. Dalam melakukan hal ini penciptaan dinamika ekonomi lokal menjadi kepentingan bersama. Untuk itu dibutuhkan penciptaan visi sebagai *rallying point* bagi munculnya sinergitas dinamika ekonomi lokal.

3. Temuan Penelitian

Tema pembangunan yang diangkat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta 2010 – 2015 adalah *Pengembangan Manifestasi Karakter Budaya Jawa Dalam Tata Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Untuk Mendukung Tata Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera*. Tema pembangunan kemudian dimanifestasikan ke dalam tiga prioritas utama yaitu : penguatan ekonomi kerakyatan; pengembangan budaya jawa untuk menguatkan citra Kota Surakarta sebagai kota budaya; dan pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang berbasis lingkungan (*eco-cultural city*). Dalam bahasa yang sederhana, penjawantahan “Solo Masa Depan Adalah Solo di Masa Lalu” adalah seperti yang dikatakan Joko Widodo “kita akan menjual Solo untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.” (Wawancara, 16 Februari 2006). Secara lebih rinci dikatakan bahwa,

Dengan karakter solo masa lalu nya ya itu..karakter jawanya. Itu track kita itu yang mau kita bangun itu. Positioningnya itu disitu nanti. Juga sebagai diferensiasinya dengan kota lain itu juga disitu. Saya enggak mau solo sama dengan Semarang. Solo sama dengan jogja. Solo sama dengan klaten. Harus beda. Ini yang nanti akan menggampangkan kita kalau sudah positioning. Sudah diferensiasi. Gampang untuk membranding kotanya. Mau bangun promosinya gampang. Mau membangun networkingnya gampang. (wawancara 9 Agustus 2009).

Eco Cultural City menjadi tema penataan kota Surakarta secara holistik. Pengembangan kota dengan menggunakan konsep seperti ini menekankan pada kekuatan karakter budaya dan lingkungan. Pertumbuhan kota menjadi “hutan beton” berusaha untuk dihindari dengan melakukan penghijauan. Perwujudan konsep ini dilakukan dengan menata lingkungan kota sesuai dengan tata kota Solo di masa lalu. Taman-taman kota yang menjadi ikon

keindahan kota Solo di masa lalu seperti taman Balekambang, taman Tirtonadi dan taman Jurug direvitalisasi dalam merengkuh keindahan kota Solo dimasa lalu. Di tingkat perkampungan sementara tanaman-tanaman buah-buahan. Jalan-jalan kota diperindah dengan penataan taman-taman kecil dipinggiran jalan dan dikombinasikan dengan tanaman pelindung Jenis tanaman pelindung memiliki masa tumbuh sangat cepat dan belum banyak dikembangkan di daerah lain, yakni jenis eucalyptus.

Bagian penting dari wajah kota Surakarta di masa lalu adalah pasar. Ada puluhan pasar yang sampai saat ini masih bertahan namun mulai terdesak eksistensinya oleh perkembangan pasar modern. Pasar-pasar utama seperti pasar Gede dan pasar Legi, merupakan pasar grosir yang menjadi tujuan tidak saja pedagang-pedagang kota Solo tapi juga kota-kota sekelilingnya. Disamping itu ke dua pasar ini juga telah menjadi ikon budaya, bukan saja karena arsitekturnya yang unik, tapi juga wisata kuliner yang ditawarkan. Pasar Gede Hardjonegoro atau yang biasa dikenal dengan Pasar Gede Solo adalah salah satu bagian penting sejarah kota Solo. Dirancang oleh arsitek Belanda bernama Thomas Karsten, Pasar Gede mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai pada 1930. Pasar ini pun menjadi pasar tertua di Solo. Nama Hardjonegoro diambil dari nama seorang abdi dalem keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT Hardjonegoro dari Keraton Surakarta. Oleh sebab itu Pasar Gede Solo juga menjadi sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Solo pada waktu itu. Tepat di depan Pasar Gede terdapat sebuah kelenteng terbesar di Solo. Sejak berdiri Pasar Gede menjadi pusat perdagangan antara masyarakat pribumi, China dan Belanda. Meski sempat mengalami beberapa kali pemugaran dan perbaikan, termasuk setelah sempat terbakar pada tahun 2000, Pasar Gede tetap sebagai pasar tradisional termegah di Solo. Arsitektur aslinya pun tetap dipertahankan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sangat puas dengan hasil penataan Pasar Gede. Pasar ini sampai sekarang tetap menjadi primadona perekonomian rakyat di Kota Solo, serta mampu bertahan di tengah terpaan modernisasi. Dalam pandangan Gita Wiryawan, “Bangunan yang kokoh, rapi, nyaman dan bersih sangat menopang terjadi transaksi. Nilai transaksinya mencapai Rp 4 miliar dengan bentuk retail dan grosir” (Sindo Jumat,20/1/2012).



Figur 3.1.Pasar Gede

Pasar Klewer merupakan pasar kain terbesar di Jawa Tengah, dan telah lama menjadi tujuan wisata. Pasar unik yang lain adalah pasar Triwindu merupakan pasar barang antik. Revitalisasi pasar dimulai dengan penataan fisik bangunan pasar dikembalikan kepada pola arsitektur lama yang khas Solo, yang disebut “Podang Kaneman” yaitu kombinasi warna cat kuning, hijau dan merah menjadi aksentuasi yang menonjolkan sisi budaya Jawa yang kuat. Bangunan ini juga didesain dengan atap sirap untuk menunjukkan nilai tradisi bangunan Jawa. Makna dari revitalisasi pasar tidak saja memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat, tetapi ekonomi rakyat yang berbasis budaya. Orang pergi ke pasar tidak saja untuk melakukan transaksi ekonomi, tapi juga menjalin hubungan sosial, seperti di masa lalu.



Figur 3.2. Pasar Triwindu

Surakarta memiliki potensi budaya yang sangat beragam. Kekayaan budaya yang berupa benda budaya (*tangibles*) berupa cagar budaya dan benda budaya. Ada 4 kawasan cagar budaya dan 32 benda budaya berupa bangunan. Potensi budaya yang *intangibles* berupa norma dan nilai tradisi. Perkembangan komunitas budaya ada lebih 341 kelompok dan beberapa sanggar seni (5 sanggar utama) dengan anggota lebih dari 11.320 orang. Revitalisasi aktivitas kesenian lokal ini juga mendapatkan perhatian yang khusus. Belajar dari banyak kota dunia even-even lokal kemudian dikemas dalam bentuk festival yang mampu memberikan tontonan yang menarik bagi warga masyarakat. Even-even ini kemudian dijadikan kegiatan tahunan yang menjadi bagian kalender kebudayaan kota Surakarta. Beberapa even yang kemudian mendunia adalah: Solo Batik Fashion, SBC (Solo Batik Carnival), SIEM (Solo International Ethnic Music), dan SIPA (Solo International Performing Arts). Pemerintah kota Surakarta membantu pengembangan sanggar-sanggar kesenian yang telah ada sejak dulu sebagai pendukung even-even di atas. Untuk itu atraksi-atraksi lokal juga direvitalisasi untuk memberikan nilai tambah pada kegiatan-kegiatan tersebut. Barangkali patut disebut Grebeg Surodiprajan dan Kirab Apem Sewu yang sukses berkembang dari kegiatan kampung menjadi festival tahunan kota. Bahkan Haul Habib, yang dilunya dilakukan dalam lingkungan kampung (Pasar Kliwon), kini menjadi agenda tahunan yang dihadiri ribuan peziarah dari berbagai kota.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan kota Surakarta memiliki tujuan membangun kota yang secara ekonomi kompetitif (Prihantika dan Harjosukarto 2011:80). Visi Solo sebagai kota budaya menjadi dasar 7 strategi yang dijadikan acuan: (1) kompetensi ekonomi. Perkembangan GDP yang terus menanjak merupakan bagian dari strategi ini. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dari strategi ini. Diikuti tiga langkah pembangunan (manajemen produk, merek dan pelayanan). Untuk menjalankan tiga langkah manajemen pembangunan ini, tiap SKPD didorong untuk mengembangkan program-program yang memiliki dampak yang signifikan, dan diberi alokasi

anggaran yang besar. Terutama program-program ini berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang berbasis visi Solo Masa Datang Adalah Solo Masa Lalu: pasar tradisional, terminal, dan taman. (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan tenaga kerja. Ini dilakukan dengan membuat OSS (one stop service) bagi semua jenis pelayanan publik, dan mengembangkan Solo Techno Park sebagai upaya untuk mendorong kota Surakarta sebagai pusat inovasi dan pendidikan vokasi di Indonesia. (3) membuat atmosfer bisnis yang baik. Laporan Bank Dunia (2010) menempatkan Surakarta sebagai kota nomor dua untuk menjalankan bisnis. (4) kualitas infrastruktur dan lingkungan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, manajemen sampah, penghijauan dan perumahan. Termasuk dalam program ini adalah relokasi hunian di bantaran Bengawan Solo. (5) sistem keuangan, perbankan maupun non-perbankan untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat. Hasilnya, Surakarta menempati posisi tertinggi secara nasional pada indikator lembaga keuangan dan perbankan. (6) Inovasi. Banyak inovasi dihasilkan, baik dari aspek manajemen produk, manajemen merek maupun manajemen pelayanan. (7). Internasionalisasi dan aksesibilitas terhadap sumberdaya global. Strategi ini dijalankan dalam 2 langkah, yaitu fisik maupun non-fisik. Untuk itu di masa walikota Joko Widodo berusaha keras untuk menjadi anggota organisasi internasional kota warisan dunia, dan diterima pada tahun 2006. Untuk menunjang program ini, kegiatan internasional dijadikan kegiatan rutin setiap tahun: kegiatan kesenian seperti festival music dunia dan festival tari tradisional dunia, serta konferensi internasional seperti konferensi menteri perumahan dunia.

Sejak tahun 2004 organisasi non pemerintah yang terdaftar di kota Surakarta lebih dari 100 buah. Menurut catatan kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) perkembangan LSM meningkat tajam setelah tahun 1999 ketika keterbukaan politik membuat lingkungan sosial dan politik kondusif bagi aktivitas LSM. Tidak ada catatan yang pasti mengenai jumlah LSM di kota Surakarta, tetapi menurut staf Kesbanglinmas Surakarta, pendaftaran kelompok-kelompok Asosiasional ini mencapai tingkat tertingginya pada era 1999-2000.

Nampak perkembangan masyarakat sipil merupakan bagian dari proses demokratisasi pengambilan keputusan. Keterbukaan pemerintah kota Surakarta terhadap keberadaan lembaga-lembaga advokasi membuat proses perumusan program dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran. Pemerintah kota bersama lembaga-lembaga advokasi mengambil inisiatif untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk merancang program-program pembangunan. Untuk itu diadakan *focus group discussion* (FGD) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah selalu melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memang telah berkecimpung di bidang tersebut.

Pola partisipasi ini juga dikembangkan dengan memanfaatkan komunitas-komunitas yang sudah ada dan dikelola dengan profesional, hal ini terutama terjadi pada bidang-bidang kesenian. Pada dasarnya semua kegiatan dengan skala besar yang bukan merupakan kegiatan rutin pemerintah kota dilakukan dengan memanfaatkan profesionalitas swasta. Dengan cara ini manajemen program bisa dikelola dengan sangat profesional melalui bantuan tenaga-tenaga trampil swasta. Ada dua keuntungan yang didapatkan dari cara-cara semacam ini. Pertama,

biaya yang bisa dihemat sangat signifikan, dibandingkan kalau diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta; kedua, ini merupakan cara untuk melatih serta membiasakan pejabat publik untuk bekerja secara profesional seperti rekan-rekan swasta mereka. Dalam salah satu wawancara dengan Joko Widodo, ketika masih menjabat sebagai walikota, dikatakan bahwa dalam bidang kesenian komunitas seni diikutsertakan secara langsung, karena mereka telah bekerja secara profesional dan memiliki jejaring yang luas

“..menejemen pake orang bisnis yang ikut dalam komunitas disitu. Jadi diorganisasi sendiri.tapi ketua tetap pemerintah. Saya sudah pesan seperti itu. Jangan ikut-ikutan jika tidak mengerti. Serahkan pada manajer masing-masing. Soalnya kalo diserahkan EO itu harganya mahal sekali. Tiga kali lipat”. (wawancara 7 Agustus 2009).

Kegiatan-kegiatan seperti ini pada dasarnya untuk menciptakan industri baru di bidang kesenian, yang menjadi ikon kota Surakarta, maupun di bidang industri kecil. Walikota Joko Widodo melihat kesempatan untuk meningkatkan segmen industri kreatif bidang kesenian ini. Pengalaman negara lain dipakai sebagai pelajaran yang baik:

“Karena di negara seperti Rusia dan China sudah menjadi industri. Pertunjukan itu sudah milik industri. Artinya mereka mendapat keuntungan dari situ. Bisa hidup dari situ Seperti festival yang di Korea itu. Itu saya lihat mereka sudah berjalan 11 tahun. Saya tanya mulanya seperti apa. Dia mulanya disuntik 2M oleh pemerintah. Kedua disuntik lagi 5M dari pemerintah.. tapi yang ketiga sudah gak disuntik.karena dia sudah dapat sponsor.. sudah habis 20M bisa sendiri. Sekarang dia hasilnya kurang lebih 200M per tahun. Jadi mereka sudah mendapat income. Jadi sudah dilepas. Gak ada budget. Saya disini juga sama”(Wawancara, 7 Agustus 2009).

Bagaimana posisi komunitas dalam perhelatan yang dilakukan even-even besar, dapat kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh komunitas Solo Batik Carnival.

SBC Community dibentuk tahun 2008 lalu saat ini telah menghasilkan karya seni dengan mengkolaborasikan berbagai cabang kesenian mulai dari tari, musik, karawitan, teater hingga modeling. SBC dirancang untuk menjadi karnaval tingkat dunia. SBC belajar dari Jember Fashion Carnival, dengan mengembangkan keunikan tersendiri, yaitu kostum yang berbasis batik.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan SBC, komunitas SBC berperan sebagai panitia. Panitia bertugas mulai perencanaan sampai pelaksanaan karnaval, Para peserta, sebagaian besar dari warga masyarakat, diwajibkan mengikuti workshop merancang kostum selama berbulan-bulan. Kemudian kostum karnaval yang dirancang dan buat peserta mereka pakai sendiri pada waktu karnaval berlangsung. Selama workshop berlangsung peserta dibimbing oleh instruktur-instruktur yang berpengalaman dibidangnya. Ada desainer, make up dan hair do, koreografi, musik, dan kepercayaan diri. Pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Simpulan

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang penting dalam kajian pengembangan visi budaya dalam pembangunan kota. Penelitian ini menemukan, strategi merangkul semua kalangan telah berjalan, berakar dari level yang paling bawah di tingkat RT, desa, kecamatan sampai kota. Inklusi juga berjalan melalui intensifnya *public hearing* antara pemerintah kota dan komunitas. Berjalannya proses ini di Kota Surakarta ini tidak lepas dari kemampuan pemerintah kota dalam melakukan *networking* dengan semua kelompok dalam masyarakat.

Karakter sosial politik warga Surakarta yang sangat aktif dalam organisasi paguyuban, membuat pendekatan kelembagaan pemerintah kota dapat dilaksanakan dengan efektif. Di Surakarta, paguyuban tidak hanya menjalankan fungsi sosial, seperti mempersatu antar profesi, misal pedagang pasar, tukang becak, pedagang kaki lima, dan bisnis, maupun fungsi ekonomi, seperti dana bergulir dan arisan, tetapi juga berfungsi secara politik sebagai wadah kepentingan warga. Di sisi lain, terdapat tradisi NGO yang kuat dan kritis yang intens mengawal berjalannya pemerintahan

Citra mempengaruhi prioritas pembangunan kota dari dua sisi. Dari perspektif *supply-side*, pemerintah kota menetapkan visi yang berorientasi budaya (Solo di masa depan adalah Solo di masa lalu) menuju *eco-cultural city* yang diejawantahkan melalui dua aktivitas utama, yaitu pengembangan infrastruktur pendukung (revitalisasi pasar tradisional, terminal dan taman) dan pengembangan event budaya secara kolosal seperti SBC, SIEM dan SIPA. Sedangkan dari perspektif *demand-side*, nampak perkembangan masyarakat sipil merupakan bagian dari proses demokratisasi pengambilan keputusan di Surakarta. Keterbukaan pemerintah kota Surakarta terhadap keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan membuat proses perumusan program dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih tepat sasaran. Disamping itu pemerintah kota bersama komunitas-komunitas yg ada mengambil inisiatif bersama-sama berupaya untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk merancang kegiatan-kegiatan. *Governance* yang mendasarkan diri pada *mutual trust* ini merespon tuntutan masyarakat dengan strategi inklusi yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan yang ada (*identification-base trust*).

Citra yang dibangun Pemerintah kota juga digunakan untuk memobilisasi gerakan pelebagaan kegiatan budaya yang bergerak dalam kerangka visi *Solo past is Solo future*. Komunitas-komunitas yang telah ada dalam masyarakat berkembang mengikuti fasilitasi yang diberikan pemerintah kota. Tumbuhnya industri pariwisata dan perhotelan bisa terjadi dalam kerangka politik inklusi pemerintah kota Surakarta. Dalam kerangka berfikir yang seperti ini, visi *Solo past is Solo future* mampu merangkum kebijakan pro-investasi dan *pro-poor* dalam satu kerangka kebijakan yang saling terkait dan saling menguatkan.

Kepustakaan

- Grindle, M.S. (2004) *Despite the Odds: Contentious Politics and Education Reform*, Princeton University Press, Princeton NJ.
- Grindle, M.S. (2007) *Going Local: Decentralization, and the Promise of Good Governance*, Princeton University Press, Princeton NJ.
- Mahbubani, K. (2007) 'From Confucius to Kennedy: principles of East Asian governance', in *East Asian Visions: Perspectives on Economic Development*, eds I. Gill, Y. Huang and H. Kharas, World Bank, Washington DC: 188–203.
- Prihantika, Ita dan Harjosukarto, Suhartono. *Journal of Administrative Science & Organization* Volume 18, Number 1 January 2011, Page 74-87
- Rodrik, D. (1996) 'Understanding economic policy reform', *Journal of Economic Literature* 34 (1): 9–41.
- Stoker, G. (1995) 'Regime Theory and Urban Politics', in D. Judge (ed.), *Theories of Urban Politics*. London: Sage, pp. 54–71.
- Stoker, G. (2000) 'Urban Political Science and the Challenge of Urban Governance', in J. Pierre (ed.), *Debating Governance. Authority, Steering and Democracy*. Oxford: Oxford University Press, pp. 91–109.
- Stone, C.N. (1995) 'Political Leadership in Urban Politics', in D. Judge (ed.), *Theories of Urban Politics*. London: Sage, pp. 96–116